



PIDATO
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TANGGAPAN PEMERINTAH
ATAS
PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN ANGGARAN 2019

RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 31 Mei 2018

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Selamat pagi,

Syalom, salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Yang Saya hormati, Saudara Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF). Kami atas nama Pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran dan pandangan serta dukungannya terhadap KEM dan PPKF Tahun Anggaran 2019, yang akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam pembahasan lebih lanjut, dan dalam penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan yang terhormat,

Perkenankan kami memberikan tanggapan dan jawaban terhadap berbagai pertanyaan dan pandangan yang telah disampaikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP); Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG); Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-GERINDRA); Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN); Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB); Fraksi Partai Demokrat (F-PD); Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS); Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP); Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NASDEM);** serta **Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (F-HANURA).**

Pertama-tama, perlu kami sampaikan konteks dinamika global yang telah dan sedang berubah mempengaruhi seluruh perekonomian dunia, dan dampaknya pada perekonomian Indonesia tahun ini dan tahun 2019. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang diselaraskan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2019, tentu harus mempertimbangkan dinamika ekonomi global dan domestik, agar kita selalu mampu menjaga stabilitas dan keamanan perekonomian dan kemajuan pembangunan.

Perekonomian dunia saat ini bergerak ke arah keseimbangan baru (*a new normal*). Tren perkembangan ini terutama dipengaruhi oleh dampak arah kebijakan di Amerika Serikat (AS) yang secara fundamental berubah. Seiring dengan semakin pulihnya perekonomian AS yang menyebabkan kecenderungan peningkatan laju inflasi serta penurunan tingkat

pengangguran di AS, menyebabkan Bank Sentral AS (*Federal Reserve*) melanjutkan normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya serta kecenderungan pengetatan likuiditas. Kenaikan suku bunga oleh *Federal Reserve* diperkirakan akan terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan, dari semula kenaikan sebanyak 3 kali menjadi 4 kali. Ini berarti terjadi kenaikan suku bunga dolar AS secara lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Selain itu, Pemerintah AS juga menerapkan kebijakan fiskal yang ekspansif dengan kebijakan pemotongan pajak dan penambahan belanja, sehingga mendorong kenaikan defisit fiskal secara cukup tajam. Potensi tambahan penerbitan *US Treasury Bill* untuk menutup defisit anggaran yang diperkirakan mencapai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) AS. Kebijakan ini juga telah menyebabkan kenaikan imbal hasil surat berharga negara tersebut.

Selain perkembangan ekonomi AS, terdapat beberapa sumber risiko ketidakpastian global. Di antaranya adalah potensi perang dagang AS dan Tiongkok, perkembangan perjanjian nuklir AS dengan Iran, serta ketegangan geopolitik di Timur Tengah, perkembangan politik negara-negara penghasil minyak seperti Venezuela, dan perkembangan di Semenanjung Korea. Perkembangan-perkembangan ini memicu perubahan yang cepat pada harga minyak dan komoditas global. Selain itu juga memicu gejolak di pasar keuangan global dalam bentuk arus modal kembali ke AS, pengetatan likuiditas global, dan penguatan dolar AS. Pada gilirannya, kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi prospek ekonomi dan perdagangan global. Kita memperhatikan dengan seksama perkembangan sektor keuangan yang memburuk di Argentina, Turki, dan beberapa hari terakhir kita mulai mendengar potensi kenaikan signifikan imbal hasil surat berharga Italia. Proses pergerakan menuju keseimbangan baru tersebut diperkirakan masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan. Sebagai bagian dari perekonomian global, sudah tentu perekonomian Indonesia tidak luput dari dinamika yang sedang terjadi.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah memandang bahwa perekonomian Indonesia di tahun 2019 memiliki potensi yang baik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4-5,8 persen. Potensi tersebut didasarkan pada beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Dari sisi permintaan agregat, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mulai ditopang secara seimbang oleh keempat mesin pertumbuhan yaitu konsumsi, investasi, ekspor dan belanja Pemerintah. Selama tiga tahun terakhir, inflasi kita pada kisaran 3,5 persen, lebih rendah dibanding rata-rata inflasi selama sepuluh tahun terakhir sebesar 5,6 persen. Perkembangan harga domestik dan laju inflasi telah mengalami penurunan dan semakin stabil merupakan faktor penting dalam menjaga tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Investasi secara bertahap mulai pulih kembali, ditopang oleh kesehatan sektor perbankan dan pasar modal, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur, serta meningkatnya daya saing iklim usaha dan investasi Indonesia. Kinerja ekspor telah mulai menunjukkan peningkatan sejak 2017 setelah beberapa tahun sebelumnya terus mencatat kontraksi.

Capaian-capaian ini telah mampu membawa perbaikan persepsi pelaku usaha terhadap prospek investasi di Indonesia dan membawa dampak positif untuk mendorong minat investor pada pasar dalam negeri. Di sisi produksi (*supply side*), pertumbuhan sektoral cukup merata baik sektor primer seperti pertanian, perkebunan dan pertambangan yang sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan perdagangan global, juga Bergeraknya sektor sekunder seperti manufaktur dan konstruksi, serta cukup sehatnya sektor tersier seperti telekomunikasi, perdagangan, hotel, restoran dan sektor jasa keuangan. Faktor-faktor tersebut merupakan landasan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Namun demikian, perubahan kondisi global menuju *a new normal* menciptakan gejolak dan tekanan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi domestik. Sebagaimana kita pahami bersama, pada saat ini banyak nilai tukar negara *emerging* dan negara maju mengalami tekanan terhadap dolar AS, termasuk Indonesia. Kondisi fundamental Indonesia saat ini cukup kuat untuk menghadapi tekanan ini, sebagaimana ditunjukkan pula pada periode tekanan global sebelumnya. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, defisit transaksi berjalan yang terjaga, cadangan devisa yang memadai, stabilitas sistem keuangan yang terjaga, serta pelaksanaan APBN yang sehat.

Pemerintah menyadari perlu diambil langkah-langkah responsif untuk menghadapi risiko berlanjutnya tekanan eksternal dan dampak dari proses terjadinya keseimbangan global yang baru. Dalam menghadapi risiko tersebut, arah kebijakan Pemerintah saat ini akan lebih difokuskan pada strategi menjaga stabilitas dan penguatan fundamental ekonomi domestik. Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta siap mengambil kebijakan yang diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan ekonomi dan menjaga keberlangsungan pembangunan termasuk mengawasi lembaga keuangan dan memitigasi risiko sedini mungkin. Dalam jangka pendek, fokus koordinasi kebijakan diprioritaskan pada menjaga dan memperkuat stabilitas ekonomi dan keuangan dengan menjaga nilai tukar Rupiah, inflasi yang rendah, defisit fiskal yang sehat, dan defisit transaksi berjalan yang aman. Dalam hal kebijakan fiskal, Pemerintah akan memperkuat posisi ketahanan fiskal melalui langkah-langkah untuk mengarahkan kebijakan fiskal guna menjaga APBN secara kredibel, terus memperkuat kesehatan APBN dalam rangka menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi stabilisasi dan menjamin kesinambungan fiskal, serta mengupayakan perbaikan posisi keseimbangan primer menuju positif dalam jangka menengah. Disadari bahwa pilihan kebijakan ini membawa risiko pada pencapaian sasaran pertumbuhan dalam jangka pendek, namun langkah ini akan memperkuat fondasi ekonomi guna menjamin keberlangsungan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi beberapa tahun ke depan dan dalam jangka menengah.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah menyampaikan penghargaan atas masukan dan pandangan dari seluruh Fraksi di DPR terkait strategi dan langkah-langkah yang perlu ditempuh. Hal ini menunjukkan bahwa

dinamika perkembangan ekonomi global dan domestik yang terjadi saat ini, menjadi tantangan kita bersama serta membutuhkan sinergi dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa untuk mengatasinya. Pemerintah menyadari bahwa dengan dukungan seluruh Fraksi di DPR, Bangsa Indonesia akan dapat melewati dinamika dan gejolak ini, sehingga perekonomian dapat terus tumbuh dan bergerak maju. Di tengah berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi, Pemerintah akan fokus mengupayakan arah kebijakan pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu membawa dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian sasaran pembangunan nasional secara bertahap dan konsisten.

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah sependapat dengan pandangan dan masukan anggota Dewan bahwa ke depan Pemerintah harus lebih berhati-hati dan cermat dalam menyusun kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Sebagaimana disampaikan juru bicara **F-PDIP, F-PG, F-GERINDRA, F-PD, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F-PPP, F-NASDEM** serta **F-HANURA**, Pemerintah harus meningkatkan kewaspadaan dan keberhati-hatian dalam penyusunan rencana kebijakan pembangunan sehingga mampu menjaga stabilitas dan terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Pandangan dari **F-GERINDRA, F-PD, F-PKS** dan **F-PAN** telah sesuai dengan langkah yang dilakukan Pemerintah dalam menyusun APBN yang kredibel, sehat dan efektif sehingga mampu menjadi instrumen kebijakan stabilisasi sekaligus menjadi motor penggerak perekonomian nasional, melalui fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi. Kebijakan pembangunan ekonomi yang ditempuh Pemerintah diarahkan untuk mendorong peningkatan daya saing, produktivitas dan investasi sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional serta pada gilirannya akan secara efektif dapat mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah juga secara kontinyu meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan BI dalam upaya pengendalian laju inflasi pada tingkat yang rendah untuk menjamin daya beli masyarakat. Di satu sisi, Pemerintah juga akan terus meningkatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi barang, khususnya produk pangan. Di sisi lain, Pemerintah juga akan tetap memberikan alokasi subsidi dan dana cadangan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pimpinan dan segenap Anggota Dewan yang terhormat,

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada seluruh Fraksi DPR, yang memberikan dukungan bagi upaya peningkatan kerja sama dan koordinasi dengan otoritas terkait, baik dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional. Bauran kebijakan fiskal, moneter, sektor riil serta penguatan pengawasan dan pemantauan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat stabilitas dan ketahanan perekonomian nasional terhadap tekanan global. Sinergi tersebut dibutuhkan untuk mendukung upaya penciptaan stabilitas nilai tukar rupiah, penyesuaian harga di pasar keuangan secara wajar, termasuk tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, serta menjaga kecukupan likuiditas di

pasar domestik. Dalam upaya mendukung stabilitas di sektor keuangan, Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan reformasi struktural guna mendorong peningkatan daya saing dan ekspor nasional, perbaikan iklim investasi, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur strategis.

Ibu, Bapak Anggota Dewan yang saya hormati,

Pemerintah sejalan dengan pandangan dari **F-GERINDRA, F-PD, F-PKS, F-PKB, F-PPP, F-HANURA, dan F-NASDEM**, terkait pentingnya mengantisipasi potensi risiko yang ditimbulkan dari fluktuasi harga komoditas global terhadap pergerakan harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) serta pencapaian target *lifting* minyak dan gas bumi. Dalam lima tahun terakhir, harga minyak dunia mengalami gejolak yang sangat tinggi. Harga minyak mentah internasional bergerak fluktuatif, mencapai di atas US\$100 per barel pada tahun 2013 hingga pertengahan 2014 yang kemudian jatuh ke tingkat harga terendah sekitar US\$30 per barel pada tahun 2015. Dalam empat bulan terakhir harga minyak internasional kembali merangkak naik di kisaran US\$70 per barel dan bahkan mendekati harga US\$80 per barel dua minggu lalu, sebelum kembali di kisaran harga US\$70 per barel beberapa hari yang lalu. Pemerintah senantiasa melakukan pengawasan terhadap dinamika pergerakan harga minyak dunia dan trennya ke depan yang dapat mempengaruhi perkembangan harga ICP. Meskipun Pemerintah dan DPR terus berusaha menetapkan harga proyeksi minyak yang realistis bagi perhitungan APBN, namun kita menyadari bahwa fluktuasi harga minyak akan tetap menjadi salah satu faktor dinamis yang membutuhkan antisipasi kebijakan secara terus menerus. Penetapan asumsi harga minyak pada level yang realistis dan seakurat mungkin dapat menjaga kesehatan postur anggaran ke depan. Namun perlu kita sadari bersama bahwa harga minyak juga akan mempengaruhi daya beli masyarakat, kesehatan keuangan dan daya saing sektor swasta, dan kondisi keuangan BUMN dalam melaksanakan penugasan subsidi Pemerintah. Hal ini membawa implikasi pilihan-pilihan kebijakan yang tidak mudah, oleh karenanya perlu dibahas bersama dengan Anggota Dewan yang terhormat agar diperoleh konsensus bersama dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia - tetap menjaga keberlangsungan pembangunan, kesehatan APBN, kesehatan neraca BUMN dan meminimalkan distorsi ekonomi. Terkait perkembangan *lifting* minyak dan gas bumi yang cenderung menurun, kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tingkat penurunan alamiah lapangan migas dan kapasitas produksi.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Dapat kami sampaikan bahwa di tengah dinamika perekonomian global yang berubah cepat seperti yang kami uraikan di atas, Pemerintah tetap menjaga pelaksanaan APBN 2018 secara tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu dalam menopang kegiatan prioritas. Sampai dengan saat ini, penerimaan negara tumbuh membaik, sementara belanja negara tetap terjaga sehat. Dengan memperhatikan pelaksanaan APBN 2018 beserta seluruh dinamika perekonomian global dan domestik di atas, Pemerintah menyusun Pokok-Pokok Kebijakan

Fiskal yang mencakup kebijakan pendapatan negara, kebijakan belanja negara, defisit anggaran, dan kebijakan pembiayaan anggaran.

Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan merupakan komponen kebijakan fiskal yang sangat penting mengingat kontribusinya yang signifikan dalam APBN dan memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah sepakat dengan pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PD**, **F-PKB**, **F-PKS**, **F-NASDEM**, dan **F-HANURA** bahwa target penerimaan perpajakan harus disusun dengan lebih realistis. Dalam menentukan target perpajakan 2019, Pemerintah selalu berpedoman pada strategi mobilisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi serta tetap mendorong reformasi perpajakan seperti yang telah direncanakan. Target penerimaan perpajakan selalu disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, historis realisasi, dan potensi perpajakan yang ada. Selain itu untuk menentukan target perpajakan yang lebih terukur maka Pemerintah juga selalu melihat kapasitas administrasi perpajakan baik dari sisi sumber daya manusia, pengawasan dan pelayanan, maupun teknologi informasi, serta program optimalisasi pajak yang akan dilakukan.

Pemerintah terus berupaya agar *tax ratio* pada tahun 2019 dapat mencapai kisaran 11,4-11,9 persen. Hal ini sejalan dengan pandangan dari **F-PDIP**, **F-PG**, **F-GERINDRA**, **F-PKB**, **F-NASDEM**, dan **F-HANURA** yang mengemukakan bahwa Pemerintah harus mengupayakan peningkatan *tax ratio*. Optimisme Pemerintah didasari oleh historis pertumbuhan penerimaan perpajakan yang mengalami kenaikan pada tahun 2017 dan dilanjutkan tahun 2018. Kami sangat berterima kasih atas apresiasi dari **F-PDIP** terkait dengan pencapaian penerimaan perpajakan 2017 yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 tercatat bahwa pertumbuhan penerimaan perpajakan mencapai 4,6 persen atau tumbuh 12,8 persen jika tanpa memperhitungkan penerimaan *tax amnesty* tahun 2016. Pasca *tax amnesty*, Pemerintah terus melakukan evaluasi melalui perbaikan sistem administrasi untuk perluasan basis data perpajakan dalam mendukung pemungutan pajak yang lebih optimal sehingga mampu mendorong peningkatan penerimaan perpajakan. Hingga akhir bulan April 2018, penerimaan perpajakan telah tumbuh lebih dari 14,9 persen (tanpa *tax amnesty*) dengan didukung oleh kinerja pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) badan yang mencapai 23,6 persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tumbuh 14,1 persen. Jika dilihat secara sektoral, maka terlihat bahwa seluruh komponen penerimaan PPh maupun PPN mengalami pertumbuhan di semua sektor. Hal ini mengindikasikan pergerakan ekonomi yang baik, meluas dan merata sehingga harus terus dijaga.

Untuk mencapai penerimaan perpajakan pada tahun 2019, arah kebijakan umum penerimaan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi penerimaan perpajakan melalui penguatan kepatuhan, pengawasan dan penggalian potensi perpajakan dengan memanfaatkan data dan informasi - melalui sinergi pertukaran informasi dan *joint-audit* antara DJP dan DJBC, ekstensifikasi barang kena

- cukai dan *digital goods*, dan melanjutkan program penertiban impor, ekspor, dan cukai berisiko tinggi;
- 2) kebijakan perpajakan untuk meningkatkan investasi dan daya saing ekspor antara lain melalui harmonisasi fasilitas pembebasan PPN untuk barang antara, fasilitasi industri dan perdagangan melalui Pusat Logistik Berikat Industri Kecil Menengah (IKM), dan pengembangan/perluasan fasilitas kawasan industri tujuan ekspor untuk IKM;
 - 3) utilisasi data dan informasi untuk kepentingan perpajakan antara lain melalui implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan *Multilateral Instrument (MLI)*, *Country by Country Reporting (CBCR)*, dan *Authorized Economics Operator (AEO)* untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Ibu, Bapak Anggota Dewan yang saya hormati,

Dapat disampaikan bahwa penetapan target pajak tahun 2019 juga telah mempertimbangkan berbagai kebijakan insentif perpajakan dalam mendorong kegiatan perekonomian. Oleh karena itu kami mengapresiasi pandangan dari **F-PKB** dan **F-NASDEM** yang juga sangat memperhatikan kebijakan insentif perpajakan. Perlu disampaikan bahwa saat ini Pemerintah telah mendesain berbagai kebijakan insentif perpajakan bagi dunia usaha yang difokuskan untuk mendorong peningkatan investasi dan meningkatkan daya saing nasional.

Kebijakan insentif perpajakan telah mulai dilakukan melalui berbagai instrumen perpajakan, seperti: *tax holiday*, *tax allowance*, fasilitas Bea Masuk, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) yang terus diberikan untuk menjamin tren pertumbuhan investasi yang semakin kokoh. Dengan tren investasi yang semakin baik, maka diharapkan terjadi peningkatan produksi nasional terutama yang berorientasi ekspor. Peningkatan kapasitas produksi nasional sangat dibutuhkan, mengingat saat ini kita sedang berusaha untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan melalui peningkatan ekspor. Selain kebijakan insentif perpajakan, untuk memperkuat ekspor maka langkah-langkah reformasi struktural juga akan terus dilakukan antara lain melalui perbaikan infrastruktur, perijinan, kepabeanan, dan lain-lain. Perbaikan iklim investasi juga ditempuh dengan melakukan penyederhanaan perijinan di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai bagian dari implementasi *Online Single Submission (OSS)*.

Pada tahun 2019 untuk memperkuat kebijakan insentif fiskal yang sudah ada, Pemerintah merencanakan kebijakan insentif fiskal baru yang diharapkan dampaknya positif mendorong kegiatan investasi dunia usaha. Direncanakan, insentif fiskal akan diberikan pada industri padat karya dan berorientasi ekspor. Pemerintah juga akan memberikan insentif fiskal bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan vokasi dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Dengan keseluruhan upaya reformasi struktural dan desain insentif fiskal tersebut diharapkan terjadi peningkatan investasi dan ekspor sehingga nantinya dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di jangka menengah.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pendapatan negara, selain bersumber dari penerimaan perpajakan juga bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah mengapresiasi pandangan dari **F-PDIP**, **F-PD**, dan **F-PKS** agar sumber-sumber PNBP dapat digali dengan lebih kreatif melalui berbagai variasi kebijakan. Komponen PNBP terdiri dari penerimaan sumber daya alam (migas dan non-migas), pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (dividen BUMN), PNBP Lainnya, dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Berbagai sumber PNBP ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

PNBP Sumber Daya Alam merupakan komponen utama dalam PNBP, namun nilainya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak internasional dan nilai tukar Rupiah. Untuk mendiversifikasi sumber PNBP, Pemerintah terus berupaya untuk menggali sumber-sumber PNBP lain khususnya yang dikelola oleh kementerian dan lembaga. Sebagai contoh, Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki pengelolaan aset negara (Barang Milik Negara/BMN) pada kementerian dan lembaga sehingga mampu memberikan sumbangan penerimaan secara optimal. Dalam hal ini, Pemerintah telah membentuk Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang diharapkan mampu meningkatkan manfaat ekonomi dan menggali potensi *return on asset* dari BMN sehingga menjadi alternatif sumber PNBP. Peningkatan PNBP juga diupayakan antara lain melalui upaya *law enforcement* terhadap tunggakan tagihan, perbaikan administrasi, dan penerapan *information technology* (IT).

Dalam upaya menggali alternatif sumber PNBP, Pemerintah tetap mengutamakan pelayanan dan tata kelola yang baik. Untuk itu, semua pungutan PNBP harus didasarkan pada aturan yang ditetapkan yakni melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah juga mempertimbangkan bahwa tarif atas pungutan yang dilakukan didasarkan pada kalkulasi yang akurat, tidak membebani masyarakat, tidak menghambat kegiatan iklim usaha, dan tetap menjaga kesinambungan sumber daya alam. Pemerintah tetap menjaga agar terhadap kelompok yang tidak mampu dapat dilakukan kebijakan tarif afirmasi sebesar nol rupiah, agar mereka tetap mampu mengakses pelayanan Pemerintah secara baik, memperbaiki pemerataan pelayanan bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan prinsip keadilan.

Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah memahami bahwa perekonomian Indonesia masih dibayangi ketidakpastian. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mempertahankan kredibilitas, kesehatan dan ketahanan APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas dan sustainabilitas perekonomian. Sejalan dengan hal tersebut, kami mengapresiasi pandangan **F-PG** mengenai perlunya penyusunan APBN yang kredibel untuk menjaga kepercayaan dunia usaha. Saat ini, Pemerintah telah dan akan terus melakukan reformasi fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Namun kami juga menyadari bahwa kredibilitas fiskal tidak bisa berjalan sendiri, tetapi perlu didukung oleh stabilitas perekonomian yang kondusif. Untuk itu, Pemerintah terus melakukan koordinasi intensif dengan otoritas moneter dan sektor jasa keuangan dalam melakukan langkah-langkah stabilisasi perekonomian domestik.

Dalam jangka pendek, stabilitas perekonomian harus didahulukan daripada mengejar pertumbuhan semata. Dengan demikian, bauran kebijakan Pemerintah tersebut dapat berkontribusi optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Pemerintah sependapat dan telah melakukan langkah sesuai pandangan dari **F-PAN** dan **F-PKS** terkait dengan perlunya mengalokasikan anggaran pada sektor yang lebih produktif serta perlunya akselerasi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan melalui pembangunan infrastruktur. Pemerintah konsisten untuk terus mengakselerasi pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian nasional melalui efisiensi ekonomi, terciptanya lapangan kerja baru, bergeraknya transaksi sektor barang dan perdagangan, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru dengan terciptanya konektivitas antarwilayah. Perlu ditekankan bahwa manfaat pembangunan infrastruktur baru akan dirasakan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang.

Dalam hal mendukung pencapaian target pembangunan infrastruktur, Pemerintah telah menempuh langkah-langkah realokasi dan efisiensi belanja menjadi lebih produktif sehingga pembiayaan infrastruktur tetap berjalan optimal, diantaranya melalui realokasi subsidi, efisiensi anggaran belanja barang, dan penajaman program bantuan sosial. Memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur tentunya tidak mungkin dengan hanya mengandalkan alokasi dari APBN saja, Pemerintah juga perlu memberdayakan peran swasta, BUMN maupun Pemerintah Daerah.

Sementara itu, untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan serta perluasan kesempatan kerja Pemerintah terus mendorong efektivitas program perlindungan sosial dengan: (i) peningkatan ketepatan sasaran melalui perbaikan akurasi data penerima dan penyederhanaan mekanisme penyaluran, (ii) melakukan sinergi antarprogram yang relevan, serta (iii) penguatan efektivitas program perlindungan sosial. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial antara lain melalui peningkatan besaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), penguatan Program Indonesia Pintar (PIP), mendorong efektivitas dan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tetap menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan dengan pemberian subsidi listrik, solar, LPG tabung 3 kg, dan minyak tanah. Pemerintah juga meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan dukungan pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Di sisi lain, juga dilakukan penguatan kualitas penyaluran Dana Desa sebagai instrumen untuk pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di perdesaan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Sebagaimana kita ketahui, perekonomian global saat ini menghadapi tantangan terjadinya tren kenaikan harga komoditas terutama harga minyak mentah dunia. Kondisi ini tentu saja berpengaruh pada perekonomian domestik maupun keuangan negara (APBN). Sehubungan

dengan hal itu, Pemerintah dapat menerima sepenuhnya masukan **F-PKB** agar kenaikan subsidi BBM akibat lonjakan harga minyak mentah perlu diantisipasi oleh Pemerintah. Perlu kami sampaikan bahwa kenaikan harga minyak mentah dunia mendorong kenaikan ICP yang secara langsung akan meningkatkan komponen biaya produksi BBM (solar), dalam hal ini termasuk LPG. Peningkatan biaya produksi tersebut tentu saja akan menyebabkan naiknya harga keekonomian. Tanpa adanya kebijakan penyesuaian harga, maka selisih antara harga keekonomian dan harga penetapan Pemerintah akan semakin lebar dan pada akhirnya akan meningkatkan beban subsidi BBM khususnya LPG tabung 3 Kg. Namun demikian, kenaikan beban subsidi BBM tersebut tetap harus memperhatikan kemampuan keuangan negara dalam tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa tantangan kenaikan harga minyak mentah dunia juga berpotensi menimbulkan dampak *multiplier* lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh **F-PPP dan F-PD**, apabila kenaikan harga minyak mentah diikuti oleh kenaikan harga BBM maka akan berpotensi meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, apabila tidak dilakukan kebijakan penyesuaian harga BBM dan listrik, akan memberikan tekanan terhadap fiskal maupun keuangan BUMN dan menciptakan distorsi ekonomi yang berdampak negatif bagi perekonomian jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah sependapat dengan masukan Anggota Dewan yang Terhormat agar Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang optimal tanpa mengorbankan kemampuan daya beli masyarakat dan, di sisi lain, tetap menjaga kesehatan keuangan BUMN, serta menjaga tata kelola dan transparansi BUMN. Hal ini perlu dilakukan agar peran BUMN sebagai penggerak perekonomian nasional dapat dijalankan secara optimal dengan tetap menjaga *corporate governance* yang baik, mengedepankan prinsip kehati-hatian, berfokus meningkatkan *value* perusahaan, dan menjalankan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengembangkan berbagai alternatif *innovative financing*, seperti sekuritisasi aset, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA), Komodo *Bond*, kerjasama dengan investor strategis serta meningkatkan sinergi antar BUMN. Langkah ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ini, Pemerintah secara khusus juga memberi perhatian terhadap kondisi keuangan Pertamina dan PLN yang mendapatkan penugasan Pemerintah terkait penyediaan energi, termasuk pembangunan kilang, pembangkit listrik, dan penyaluran energi bersubsidi agar tetap sehat dan tetap dapat menjalankan penugasan sesuai target yang diharapkan.

Ibu, Bapak Anggota Dewan yang terhormat,

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan salah satu komponen belanja negara yang memperkuat implementasi desentralisasi fiskal. TKDD berperan strategis dalam mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) serta mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah. Pemerintah menyadari bahwa alokasi TKDD

yang semakin meningkat dapat menjadi instrumen stimulus yang memberikan dampak *multiplier* terhadap pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota hingga wilayah perdesaan.

Oleh karena itu, Pemerintah sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi atas pandangan dan dukungan **F-PG, F-PD, F-PKS, F-PAN, F-NASDEM**, serta **F-PKB** untuk meningkatkan kualitas pengelolaan TKDD. Peningkatan alokasi TKDD dalam tahun 2019 akan dilakukan secara terukur dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara. Untuk meningkatkan peran TKDD dalam pembangunan daerah, Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan TKDD, diantaranya dengan mempertajam fokus pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) *earmarked*, menyempurnakan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID), menyalurkan Dana Transfer Khusus berbasis kinerja *output/outcome*, serta pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan pada pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan potensi ekonomi desa melalui kegiatan padat karya tunai (*cash for work*).

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Menanggapi pandangan **F-PD, F-PDIP, F-PKS**, dan **F-PKB** terkait pengelolaan defisit anggaran dan pembiayaan, kiranya dapat kami jelaskan bahwa untuk menjalankan fungsi APBN sebagai instrumen stabilisasi, alokasi dan distribusi secara seimbang dan efektif, arah kebijakan fiskal yang ditempuh Pemerintah 2019 masih cenderung ekspansif yang lebih terarah dan terukur. Defisit dirancang pada kisaran 1,6-1,9 persen PDB untuk tetap menjaga daya dorong ekonomi dan melindungi masyarakat paling rentan dan miskin, mengurangi kesenjangan, namun dengan tetap mampu menciptakan ruang fiskal untuk menjaga perekonomian dari potensi gejolak global. Untuk menutup defisit anggaran tersebut, Pemerintah melakukan pengelolaan pembiayaan yang tetap dijaga secara hati-hati. Pengelolaan utang senantiasa mengedepankan aspek kehati-hatian (*prudent*), produktivitas dalam pemanfaatan, efisiensi *cost of borrowing*, dan tetap menjaga keseimbangan makro ekonomi. Pembiayaan utang dilakukan dengan perencanaan yang baik dan berhati-hati serta memperhitungkan kembali plafon pinjaman dan kesanggupan membayar kembali pinjaman.

Untuk mengendalikan risiko utang, Pemerintah selalu menjaga rasio utang dalam batas hati-hati dan *manageable* sesuai aturan perundangan-undangan, komposisi utang dalam batas aman dan efisien, serta mengedepankan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif dengan prioritas utama pada pembangunan infrastruktur dan penguatan kualitas SDM. Berdasarkan perkembangan selama lima tahun terakhir, defisit anggaran tetap terkendali dalam batas aman. Dalam jangka menengah, defisit akan diupayakan semakin mengecil namun tetap produktif untuk menstimulasi perekonomian. Rasio utang juga diharapkan semakin mengecil dan keseimbangan primer diarahkan menuju positif pada tahun 2020 sehingga menjadi fondasi yang kokoh bagi pemerintahan periode berikutnya untuk menyusun strategi pembangunan.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat,

Demikianlah jawaban dan tanggapan Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dalam rangka Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019. Tanggapan atas Pemandangan Umum DPR yang lebih lengkap kami sampaikan secara tertulis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang kami sampaikan ini.

Sebagai penutup, sekali lagi atas nama Pemerintah, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan kerja sama segenap anggota Dewan selama ini dalam menyelesaikan agenda-agenda konstitusional yang merupakan amanat mulia dari seluruh rakyat Indonesia. Akhir kata, semoga pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan lancar sehingga dapat diselesaikan secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Wassalammu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh.

Jakarta, 31 Mei 2018

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan

ttd

Sri Mulyani Indrawati